

Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba

Eka Henny Purwanti

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

email: Ekapurwati2@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article

Kata Kunci:

Penerapan Aplikasi;

SIKS-NG;

good governance;

e-government;

Article History

Dikirim: 27 desember 2022

Diterima: 5 Januari 2023

Dipublikasi: 27 Februari 2023

ABSTRAK

Perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh bagi sector public, secara khusus bagi jalannya roda pemerintahan di Indonesia yang kita kenal dengan e-government. Penerapan e-government merupakan salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan implementasi e-government juga beragam, salah satunya dengan cara melakukan pembaruan data melalui verifikasi dan validasi data menggunakan aplikasi Sosial Next Generation Geographic Information System (SIKS-NG). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017, tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap tahun sekali. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan berdasarkan by name by address, yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pada pelaksanaan program penanganan fakir miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesuai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan, masalah yang sering muncul dalam proses implementasi yaitu data yang berada di Aplikasi SIKS-NG berupa NIK keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga menyebabkan data tersebut tidak bersinergi, sehingga pada saat dilakukan pengusulan DTKS terjadi ketidakcocokan dan ketidakvalidan data dalam system aplikasi SIKS-NG. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan gejala sosial yang terjadi dan berusaha memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan objek penelitian.

ABSTRACT

The development of this technology is also very influential for the public sector, specifically for the running of government in Indonesia, which we know as e-government. The implementation of e-government is one way for the government to provide good services to the community and the implementation of e-government is also varied, one of which is by updating data through data verification and validation using the Social Next Generation Geographic Information System (SIKS-NG) application. Law Number 13 of 2011, concerning Handling of the Poor, and Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 57/HUK/2017, concerning Determination of Integrated Data for the 2017 Poverty Handling Program, regencies/cities throughout Indonesia have the mandate to carry out verification and validation (verification) data once every year. Verification and validation are carried out based on name by address, which in SIKS-NG is a reference for implementing programs for handling the poor. Based on the results of the research conducted, the implementation of the SIKS-NG application in updating the Integrated Social Welfare Data (DTKS) produces data that is appropriate to the appropriate conditions for Beneficiary Families (KPM) in the field. The problem that often arises in the implementation process is the data in The SIKS-NG application in the form of the beneficiary family's NIK does not match the data in the field, causing the data to not be synergistic, so that when the DTKS is proposed there is a mismatch and invalidity of the data in the SIKS-NG application system. This type of research uses a qualitative descriptive approach which aims to answer and solve social phenomena that occur and tries to provide clear pictures of the problems of the research object.

1. Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas tentang Dampak Penerapan *Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial –Next Generation (SIKS-NG)* Dalam Meningkatkan *Good Governance* di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba alasannya adalah Pemerintah Desa Sihiong ingin melakukan pembaruan dan perubahan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya system pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh

proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan pemerintahan yang baik, maka pemerintah Desa Sihiong dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas. Pemerintah desa dituntut untuk memberikan layanan public yang baik, karena pada hakikatnya layanan publik merupakan cikal bakal terbentuknya interaksi hubungan yang baik bersama pemerintah desa dengan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan system informasi desa dan system informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Desa merupakan lembaga administrative terkecil dari system pengendalian pemerintahan desa dan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi serta terus meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan data pengelolaan kependudukan desa (Noor Asyikin et al.,2015)

Kepala Desa Sihiong Bapak Robert Sitorus mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi SIKS-NG ini merupakan aplikasi yang diturunkan dari pemerintah pusat kepada desa untuk membantu desa dalam hal penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dianggap ekonomi lemah dengan cara pengusulan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bantuan sosial tersebut berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT). Desa berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh layanan prima, pelopor penyelenggaraan informasi, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta sumber data dan informasi untuk menetapkan berbagai kebijakan pemerintahan (Rozi et al.,2017)

Pada era globalisasi ini dunia menunjukkan pertumbuhan kemajuan teknologi yang pesat, perkembangan laju pertumbuhan teknologi ini memudahkan manusia dalam pertukaran informasi

meskipun dihadapkan dengan jarak yang jauh. Perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh bagi sector public, secara khusus bagi jalannya roda pemerintahan di Indonesia yang kita kenal dengan e-government. Penerapan e-government merupakan salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan penerapan e-government juga beragam, salah satunya dengan cara melakukan pembaruan data melalui verifikasi dan validasi data menggunakan aplikasi Sosial Next Generation Geographic Information System (SIKS-NG). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017, tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap tahun sekali. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan berdasarkan by name by address, yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pada pelaksanaan program penanganan fakir miskin.

Pembaruan data ini merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh setiap Operator SIKS-NG, hal ini bertujuan agar bantuan yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dapat diberikan kepada warga yang tepat sasaran, dan pemerintah dapat memantau kondisi ekonomi sosial melalui aplikasi SIKS-NG ini. Keberadaan internet mendorong pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mendorong semua jenis kehidupan untuk memanfaatkan teknologi tersebut sepenuhnya. Penggunaan internet di instansi pemerintahan tersebut sepenuhnya untuk mendorong realisasi e-government yang diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan kekuatan masyarakat dengan meningkatkan akses informasi, meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperkuat interaksi antara pemerintah dan swasta di industry terkait, serta meningkatkan kemudahan dan keterbukaan pengelolaan pemerintahan (Hardiansyah,2011). Melalui e-government dalam mengoptimalkan teknologi informasi yang ada untuk

mengimplementasikan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan, pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (InPres RI) Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Teknologi Informasi) Nomor 6 yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah wajib menggunakan teknologi telematika, mendukung tata pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi dan penerapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government. (Fitri et al., 2017). Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk memberikan layanan public yang lebih baik, dengan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan industri dan perdagangan, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan (Rahmawati, 2017). Keuntungan lain dari penggunaan teknologi informasi untuk instansi pemerintah termasuk mengurangi tindakan penyelewengan, meningkatkan keterbukaan, meningkatkan kecepatan, meningkatkan pendapatan dan atau mengurangi pembiayaan (Ibrahim & Maita, 2017; Firman dkk, 2017). Kondisi layanan public terlihat lebih baik belakangan ini, birokrasi public secara aktif mengembangkan urusan e-governmen. Kementerian lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah propinsi, kota dan kabupaten serta birokrasi publik lainnya menerapkan adanya trend e-governmen dalam system pemerintahan yang layak untuk diperhatikan dan dipelajari (Nugraha, 2018).

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Propinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari tiga dusun dan jumlah penduduk 230 KK. Lokasi ini dipilih karena di desa ini sudah menerapkan aplikasi Siks-ng untuk mengolah data kemiskinan. Pengumpulan data dengan berinteraksi tanya jawab secara langsung

yang dilakukan oleh peneliti kepada informan atau perantara yang memungkinkan untuk dapat digali terkait persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Pewawancara membawa pertanyaan untuk digunakan sebagai acuan kepada narasumber dalam hal ini Operator SIKS-NG Desa Sihiong yaitu Bpk. Marusaha Butarbutar, Kepala Desa Sihiong yaitu Bpk. Robert Sitorus, Pj. Kepala Dusun 1 yaitu Ibu Rahmawati Sitorus, Kepala Dusun 2 yaitu Bapak Nasib Simanjuntak dan Kepala Dusun 3 yaitu Bapak Dodi Tambun.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Penerapan E-Government pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong

Aplikasi SIKS-NG ini menghadirkan data kemiskinan yang akurat melalui beberapa program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT). System ini secara online dapat diakses oleh Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, data terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian sosial didukung oleh Pemerintahan Daerah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, up to date dan terintegrasi. Pelaporan pendaftaran atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan-kecamatan-kabupaten-propinsi-pusat, selanjutnya data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh Desa Sihiong untuk penanganan kemiskinan.

Aplikasi SIKS-NG ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang terdapat dalam Form Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdiri dari:

- 1) View DTKS, Pada fitur ini operator SIKS-NG dapat melakukan pemadanan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), sehingga apabila terjadi perubahan data pada KPM tersebut, operator dapat mengupdate melalui fitur ini.

- 2) Rekap DTKS, Rekap DTKS berguna untuk melihat nama-nama warga yang sudah masuk dalam daftar DTKS sebagai penerima bantuan sosial.
- 3) Verifikasi kelayakan, Fitur verifikasi kelayakan berguna untuk menidaklayakan keluarga penerima manfaat dalam hal : 1) dianggap sudah memiliki ekonomi yang baik, 2) sudah menerima gaji bulanan tetap contoh : ASN, PPPK, Perangkat Desa, 3) sudah tidak memiliki tanggungan anak yang bersekolah.
- 4) Usulan baru, Pada fitur usulan baru operator SIKS-NG desa, dapat melakukan pengusulan baru bagi warga yang dianggap lemah ekonominya untuk diusulkan masuk dalam daftar DTKS melalui musyawarah desa. Pada pengusulan ini operator akan disuguhkan beberapa instrument pertanyaan di dalamnya dan harus mengisinya sesuai dengan kondisi real calon penerima manfaat tersebut dan mengupload bukti pendukung seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan foto rumah calon penerima tampak depan.
- 5) Perbaiki data, Perbaiki data yang dimaksud pada fitur ini adalah operator dapat melakukan perbaikan data pada keluarga penerima manfaat apabila terjadi perubahan data pada keluarga penerima manfaat tersebut dalam hal terjadi seperti meninggal dunia, maka nama penerima manfaat bantuan sosial tersebut dapat diganti dengan anggota keluarganya yang lain selama masih dalam daftar satu kesatuan yang terapat pada kartu keluarga tersebut.
- 6) PBI merupakan singkatan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diberikan pemerintah kepada golongan fakir miskin dan tidak mampu. Melalui fitur ini operator dapat mengusulkan kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga untuk diusulkan guna mendapatkan PBI, yang mana PBI ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan check kesehatan, rawat inap di rumah sakit yang biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Perubahan terhadap data DTKS di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi pada tahun 2022 mencapai 87 KPM penerima BPNT dan PKH sedangkan pada tahun 2023 data DTKS berubahmenjadi 65 KPM terdapat selisih sebanyak 22 KPM (sumber : data rekapitulasi DTKS Tahun 2023 pada aplikasi SIKS-NG Desa Sihiong). Data tersebut menunjukkan bahwa

97

penggunaan aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi cukup efektif dalam melakukan penyaringan atau penyeleksian penerima bantuan sosial, sehingga bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Pengurangan jumlah KPM ini terjadi karena cukup banyak KPM yang tidak layak menerima bantuan sosial, dan aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi survei yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan cara melakukan verifikasi dan validasi DTKS serta melampirkan bukti yang lebih objektif dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS karena melampirkan foto tampak depan KPM. Aplikasi SIKS-NG juga dapat melakukan pencocokan DTKS dengan data dilapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat desa Sihiong yaitu Ibu Marta Julastri selaku warga dusun 1 desa Sihiong berpendapat, bahwa dengan adanya bantuan sosial ini yang di data melalui aplikasi SIKS-NG sangat membantu sekali dirinya dan keluarga selaku penerima manfaat bantuan PKH, sehingga warga yang mendapatkan bantuan ini tepat sasaran dan data-data yang dimasukkan dalam aplikasi SIKS-NG ini sesuai dengan kondisi real di lapangan. “Dengan kondisi rumah saya yang hamper seluruh bangunan fisiknya terbuat dari papan, sumber penerangan rumah berasal dari 450 watt, anak yang saya miliki berjumlah 6 orang (2 orang SD, 2 orang SMP dan 2 orang SMA) dan penghasilan suami yang tidak menentu sebagai penebang kayu di hutan, tentu bantuan sosial PKH ini sangat membantu kondisi perekonomian kami ujar beliau”.

Berikut rincian besaran yang diterima keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH dengan kategori sebagai berikut berdasarkan Kementerian sosial Tahun 2022:

1. Kategori ibu hamil/nifas Rp. 3 juta pertahun
2. Kategori anak usia ini Rp. 3 juta pertahun
3. Kategori lansia Rp.2,4 juta pertahun
4. Kategori penyandang disabilitas Rp. 2,4 juta pertahun
5. Kategori anak SD Rp.900.000 pertahun
6. Kategori anak SMP Rp. 1,5 juta pertahun
7. Kategori anak SMARp. 1,5 juta pertahun

Total uang yang diterima oleh Ibu Julastri setiap tahunnya adalah Rp. 7.800.000, dan penyaluran bantuan ini dibagi dalam 4 tahap atau pertriwulan, sehingga bantuan sosial PKH yang diterima Ibu Marta Julastri per triwulan Rp.7.800.000: 4 = Rp. 1.950.000 . Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Septenty Pandiangan warga dusun III desa Sihiong selaku penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), beliau mengatakan bahwa bantuan BPNT ini juga sangat berdampak besar membantu perekonomian keluarganya, “suami saya hanya sebagai buruh tani dan saya bekerja sebagai penjual kue, kami harus mengeluarkan uang kotrak rumah sebesar Rp. 3.000.000 per tahun, tentu saja kami sangat berterimakasih bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial BPNT ini sehingga membantu perekonomian kami ujanya”. Dengan jumlah besaran yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 200.000 yang disalurkan pertriwulan, sehingga total yang diterima oleh keluarga ini adalah Rp. 200.000 x 3 bulan = Rp. 600.000. Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga tidak kalah menariknya bagi Ibu Erni Priscanda Purba warga dusun I desa Sihiong ini, dengan kondisi yang mengidap penyakit gagal ginjal dapat memudahkan ibu ini untuk melakukan rawat inap dan chekup rutin di rumah sakit tanpa ada keraguan karena semua biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan E-Government pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong :

Adapun faktor-faktor pendukung sebagai berikut;

1. Tersedianya wifi desa BAKTIASI yang berasal dari bantuan hibah KOMINFO RI yang diberikan kepada desa Sihiong
2. Adanya honor yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa melalui Alokasi Dana Desa kepada operator SIKS-NG sebesar Rp.200.000 per bulan.
3. Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Toba kepada operator SIKS-NG guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG kepada operator SIKS-NG desa. Pelatihan ini dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Sosial Kabupaten Toba dengan mengumpulkan semua operator SIKS-NG desa di Kantor Kecamatan Bonatua Lunasi untuk diberikan pelatihan, keterampilan, pengetahuan terkait aplikasi SIKS-NG dan pelaksanaan pelatihan ini dilakukan 3 kali dalam setahun.

Untuk faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut;

- a. Sering terjadi pada data di lapangan yaitu sering kali muncul NIK ganda yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan data, sehingga aplikasi SIKS-NG menunjukkan NIK yang tidak valid yang telah terdata pada data DTKS dan mempengaruhi dalam proses pencairan bantuan sosial.
- b. Letak rumah warga yang jauh sehingga menyulitkan operator SIKS-NG desa dalam melakukan interview data.
- c. Masih minimnya honor yang diterima oleh operator SIKS-NG melalui pengalokasian Alokasi Dana Desa senilai Rp.200.000/bulan dan penyaluran honor ini dilaksanakan per triwulan sehingga dirasa belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan sebagai operator.
- d. Jaringan internet yang lemot akibat signal yang tidak konsisten, hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi geografis Desa Sihiong yang dikelilingi oleh pegunungan, hal ini mempengaruhi jangkauan wifi desa yang terbatas akibat kondisi geografis desa Sihiong.
- e. Minimnya sarana seperti kendaraan dinas pada Pemerintah Desa Sihiong, yang hanya memiliki satu kendaraan dinas roda dua, hal ini dapat menghambat pekerjaan operator SIKS-NG ke lapangan guna melakukan wawancara dengan calon penerima bantuan sosial.

Menurut hasil penelitian Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2004:15), untuk mengimplementasikan e-governmenti sector public, tiga unsur kesuksesan yang harus dimiliki yaitu adanya *support* merupakan salah satu point penting yang menentukan keberhasilan implementasi urusan. E-government yang mendukung pelaksanaan urusan e-government, antara lain adalah *Political will*. *Political will* merupakan dukungan dari implementasi nyata oleh pemerintah. Tanpa kemauan politik, proses penerapan dan penggunaan e-government di Desa

Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya dukukungan kemauan politik membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan e-government dan menerapkan hal tersebut di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi yang didasarkan pada hukum dan peraturan Bupati Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba. Surat Keputusan Kepala Desa Sihiong Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Operator SIKS-NG Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi.

Kedua adalah *Capacity*, penerapan e-government sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengimplementasikan e-government di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan infrastruktur teknologi informasi. Sumber Daya Manusia di desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi perangkat desa tidak cukup dalam mengelola urusan e-government, hanya sedikit perangkat desa yang menguasai dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi. Sumber Daya Anggaran, Sumber daya keuangan diperlukan untuk mendukung ketersediaan sumber daya lain, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia untuk pelatihan operator SIKS-NG agar dapat meningkatkan kualitas dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG.

Infrastruktur Teknologi Informasi, Dengan infrastruktur pendukung pemerintah desa Sihiong berbasis teknologi dapat mewujudkan pemerintahan desa Sihiong yang berbasis elektronik. Desa Sihiong yang memiliki wifi BAKTI ASI merupakan bantuan hibah dari KOMINFO RI dapat mengakses aplikasi SIKS-NG secara online. Unsur value didasarkan pada manfaat yang diterima pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima, e-government dapat menentukan terhadap seberapa besar pengaruh penerima layanan. Keberadaan system informasi dan internet berguna dalam upaya mendapatkan kualitas tata kelola di elemen desa. Di tingkat pemerintah desa, menerapkan e-government tidak menjadi kendala untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan komunikasi lintas pemerintahan. Dengan aplikasi

SIKS-NG ini pemerintah desa Sihiong dapat terbantu mendata bantuan sosial dengan sasaran warga yang benar-benar sesuai kriteria penerima bantuan sosial untuk mendukung e-government. Dengan adanya e-government dapat meningkatkan efisiensi internal, memberikan pelayanan public atau penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta dapat berjalan lebih cepat.

4. Penutup

Dari proses implementasi aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba ditemukan masih banyak kendala. Proses verifikasi dan validasi DTKS menggunakan aplikasi merupakan proses mencocokkan data di lapangan dengan data DTKS, karena data yang berada di lapangan masih banyak yang tidak valid sehingga dapat menghambat proses penyaluran bantuan sosial. Banyaknya NIK yang tidak valid sehingga mendorong penggunaan aplikasi SIKS-NG GIS terus dilakukan hingga data yang disajikan dapat valid.

Perlu adanya dorongan, pengawasan serta political will oleh pegawai yang berwenang di lapangan dalam melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS menggunakan aplikasi SIKS-NG agar bantuan sosial dapat didistribusikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Peningkatan kualitas aplikasi SIKS-NG dirasa perlu karena aplikasi tersebut adalah aplikasi yang bertugas sebagai pemutakhiran DTKS. Selain peningkatan kualitas aplikasi juga dibutuhkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak menimbulkan sumber daya manusia yang gaptek (gagap teknologi).

Daftar Pustaka

- Badri,M.(2016). PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
- Fitri,R.,syikin,A.N., & Nugroho, A.S.B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK. *POSITIF : Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, 3(2), 99-105. <https://doi.org/10.31961/positif.v3i2.429>
- Firman, F., & Rahmawati, R. (2017). Penerimaan dalam E-Government (Studi Fenomenologi pada Pengguna Layanan Terpadu Satu Pintu di BPTSP DKI Jakarta. *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, 3(2).
- Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator dan Implementasinya. *Gava Media*,250. <http://repository.usu.ac.i/bitsream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf>
- Ibrahim,W.H., & Maita, I. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informsi*,3(2),17-22.
- Moleong, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Noor Asyikin,A.,Fitri,R.,Setiyo Budi,A.N., & Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Banjarmasin,S.(2015). Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Perkantoran Desa Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1. *ISSNPrint Jurnal POROS TEKNIK*, 7(2),2085-576154.
- Nugraha,J.T.(2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi an Kajian Media*, 2(1),32-42.
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*, 5(2), 386-404.
- Rozi, F., Listiawan , T., & Hasyim, Y. (2017). Pengembangan Website Dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 2(2), 107-112. <https://doi.org/10.29100/jupi.v2i2.366>